

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu industri yang sangat berkembang. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar (UU No. 20 Tahun 2008). Setiap tahunnya, peningkatan industri ini cukup tinggi. Terbukti dari meningkatnya kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap produk domestik bruto dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir (Kompas, 2015). Data yang ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2015) yakni jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang ada saat ini adalah 59.262.772 dan jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai 123.229.386 orang.

Kelebihan UMKM dibanding usaha besar adalah kekebalannya terhadap krisis ekonomi dan kemampuannya untuk menjadi katup pengaman bagi dampak krisis, contohnya pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (Sumodiningrat, 2005). Scarborough dan Zimmerer (2005) menyatakan bahwa pemulihan krisis ekonomi yang ada di Indonesia selama tujuh tahun dan beberapa studi menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya mengandalkan usaha besar, namun UMKM terbukti memiliki ketahanan relatif lebih baik dari pada usaha skala besar.

Jika dilihat dari sejarahnya, UMKM adalah awal dan cikal bakal bangkitnya ekonomi kerakyatan bagi rakyat Indonesia yang juga merupakan contoh konkrit tumbuhnya perekonomian Indonesia. Era sebelum krisis orde baru, UMKM mampu menyerap 95 persen angkatan yakni sebanyak 110 juta orang, disaat sektor ekonomi Indonesia dikuasai oleh perusahaan besar yang hanya mampu menyerap 2 persen angkatan kerja (Rokhayati, 2015). Kontribusi UMKM masih harus dikembangkan. Terutama kontribusinya terhadap rantai pasok global. Kompas (2015), menyebutkan bahwa pasokan sektor UMKM ke rantai pasok produksi global sangat minim yakni 0,8 persen. Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara.

Kontribusi sektor UMKM Thailand terhadap ekspor 29,5 persen dan Filipina 20 persen. Di tingkat global, kontribusi sektor UMKM Jerman terhadap ekspor mencapai 55,9 persen dan Jepang sekitar 53,8 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti yang dikatakan Rizki dan Sylvia (2012), potensi yang besar dari UMKM tersebut sering terkendala masalah permodalan untuk mengembangkan usaha. Contoh daerah di Indonesia terkait masalah permodalan pada UMKM adalah dari Kota Malang. Menurut data yang dihimpun oleh Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, permasalahan UMKM berkaitan dengan permodalan, pemasaran, pengelolaan yang kurang professional. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki UMKM (Hesti, 2012).

Modal atau pembiayaan menjadi salah satu faktor terpenting dalam pengembangan UMKM. Perkembangan UMKM mengakibatkan bertambahnya jumlah kebutuhan modal yang besar, sehingga mereka tidak lagi bisa mengandalkan uang tabungannya untuk menjadi modal pengembangan usaha, tetapi harus mengandalkan pinjaman pada pihak ketiga. Untuk dapat memperoleh modal dari bank penyalur kredit, terdapat syarat tersedianya informasi akuntansi berupa laporan keuangan mengenai kegiatan usaha mereka. Selain itu, informasi akuntansi yang dibuat dapat membantu pelaku UMKM dalam mengambil keputusan penting, mengidentifikasi pengembangan usaha, mengelola keuangan sehingga dapat mencapai sukses yang lebih dari yang mereka rasakan sebelumnya. (Nuramalia, 2015).

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Kusuma (2018), fungsi dan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah menghasilkan keluaran yang bermanfaat, namun masih terkendala oleh kendala yang memang banyak dihadapi oleh para pengusaha yakni keterbatasan dalam membuat laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia cabang Medan Sumatera Utara pada tahun 2008 diketahui hanya 22,5% pelaku UMKM yang memiliki laporan keuangan. Data lainnya menyebutkan 87,5% menyusun laporan keuangan secara tidak laik dan tidak sesuai standar.

Laporan keuangan menjadi salah satu hal terpenting yang dimiliki oleh suatu entitas, karena dapat meningkatkan tata kelolanya. Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak luar perusahaan

(Wahyudiono, 2014). Manfaat jika UMKM melakukan pencatatan akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan dapat dirasakan berbagai pihak. Pihak terdekat yang paling diuntungkan dalam penyusunan laporan keuangan UMKM adalah UMKM itu sendiri. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memaparkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan ekonomi oleh siapa pun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Laporan keuangan sangat penting untuk dijadikan acuan kinerja suatu entitas/UMKM. Laporan keuangan menjadi alat kontrol dan alat yang mempermudah UMKM sebagai wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajaknya dengan baik. Jika pajak yang diserap negara sudah sesuai, maka akan dapat membiayai infrastruktur negara sehingga rakyat semakin sejahtera. Penyebab UMKM tidak menyediakan laporan keuangan dalam usahanya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan serta UMKM terlalu fokus pada proses produksinya (Putra dan Kurniawati, 2012).

Fenomena yang terjadi adalah Jakarta Timur merupakan Kota administratif yang memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak. Terdapat 162.465 usaha kecil dan menengah yang terdapat di Jakarta Timur (Dinas Koperasi dan UKM, 2017). Data Bank Indonesia tahun 2018 juga menyebutkan bahwa jumlah UMKM yang layak diberikan kredit menempati jumlah tertinggi yakni 222 usaha. Hal ini

dikarenakan bisa jadi karena laporan keuangan UMKM tersebut belum memiliki laporan keuangan sesuai SAK EMKM sehingga mereka belum dapat mengajukan kredit.

Standar pelaporan keuangan adalah suatu cara menyeragamkan laporan keuangan pada setiap perusahaan yang berfungsi sebagai acuan dan pemahaman yang sama terkait laporan keuangan. Standar pelaporan keuangan di Indonesia dibuat oleh lembaga yang diberi kewenangan yakni Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Adanya standar pelaporan keuangan juga berfungsi untuk menginterpretasikan hasil laporan keuangan dari berbagai entitas. IAI mengeluarkan berbagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan yang awalnya dirumuskan oleh Komite Prinsipil Akuntansi pada tahun 1984.

Standar pelaporan akuntansi begitu penting bagi para entitas, hingga akhirnya IAI memahami beberapa masalah yang terjadi pada UMKM terkait pelaporan keuangan, maka inovasi dan solusi yang diberikan adalah dengan menerbitkan suatu standar pelaporan keuangan yang sederhana dan mudah untuk dipahami dan diterapkan oleh UMKM. Standar baru tersebut dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM mulai diusulkan dan diterbitkan berupa *Exposure Draft* pada 1 Januari 2016 dan akhirnya berlaku pada 1 Januari 2018. SAK EMKM yang mensyaratkan laporan keuangan yang lebih sederhana, namun tetap menyajikan informasi yang handal.

EMKM yang dimaksud oleh IAI adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan

menengah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Dalam hal ini UMKM dapat memakai standar baru yang diterbitkan oleh IAI. SAK EMKM dihaapkan memudahkan UMKM dalam menyusun laporan keuangan untuk berbagai kepentingan.

SAK EMKM adalah salah satu standar pelaporan keuangan yang sederhana. Sebelumnya, standar yang dikenal dan dipakai banyak perusahaan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pelaporan keuangan bagi UMKM dipermudah dengan adanya SAK EMKM karena memiliki sistem yang ringkas dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan karakteristik dari UMKM. Nantinya, laporan keuangan dengan mengikuti SAK EMKM, akan berguna untuk banyak hal. Satu diantaranya adalah mudahnya mendapatkan modal usaha tambahan

Laporan keuangan berguna untuk dapat mengajukan permohonan permodalan kepada bank rakyat, bank syariah, maupun kepada penyedia modal lainnya. Laporan keuangan yang dilampirkan untuk mengajukan dana tersebut akan diterima apabila laporan keuangan UMKM sesuai standar karena dapat dimengerti oleh pihak penyedia modal. UMKM perlu untuk segera menyiapkan laporan keuangan sesuai standar, yakni sesuai SAK EMKM. Terdapat beberapa hal yang memengaruhi UMKM untuk menerapkan SAK EMKM dalam laporan keuangannya, yakni tingkat pendidikan, teknologi informasi dan persepsi pelaku UMKM.

Hal-hal tersebut akan diuji mengenai pengaruhnya terhadap penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan yang dibuat UMKM. Berbagai faktor yang memengaruhi penerapan SAK EMKM pada UMKM telah diteliti oleh penelitian terdahulu. Penelitian tersebut menghasilkan berbagai macam faktor baik yang memengaruhi maupun tidak berpengaruh penerapan SAK EMKM. Adapun penelitian-penelitian terdahulu mengenai penerapan SAK EMKM yang menjadi referensi dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah: Penelitian tentang kualitas laporan keuangan terhadap penerapan SAK EMKM dilakukan oleh Sariningtyas dan Diah (2011) dan juga Pratiwi dan Hanafi (2016) yang menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan yang terdiri dari berbagai macam elemen yakni sederhana dan dapat dipahami, tepat waktu, dapat dipercaya, jujur dan dapat dibandingkan adalah salah satu syarat dalam membuat SAK EMKM. Kualitas laporan keuangan menurut penelitian sebelumnya dinyatakan berpengaruh pada penerapan SAK EMKM, namun terdapat juga yang menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh pada penerapan SAK EMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2018) menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara tingkat pendidikan dengan penerapan SAK EMKM. Sebuah proses mengubah perilaku seorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan pola pikir melalui sebuah pengajaran dan pelatihan yang sesuai prosedur merupakan suatu pendidikan. Perbaikan kinerja perusahaan dan peningkatan daya saing dapat dilihat dari tingkat pendidikan seseorang baik pemilik dan juga karyawan (Hariandja, 2002:169).

Faktor lain yakni pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM yakni dibuktikan oleh penelitian Zenny dan Ayu (2017), Divianto dan Febrianty (2017), Debbianita (2016) dan Elyana (2016). Teknologi adalah berbagai hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, serta pengorganisasian dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya.

Teknologi informasi dapat dijadikan acuan seseorang untuk dapat mengakses berbagai informasi termasuk informasi akuntansi yang penerapannya dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Teknologi Informasi menjadi penghubung antara kedua variable yakni kualitas pelaporan keuangan dan tingkat pendidikan pemilik terhadap penerapan SAK EMKM. Penelitian yang dilakukan Fitri, (2017) meneliti pengaruh teknologi informasi sebagai moderasi kualitas pelaporan keuangan, menyebutkan belum adanya hubungan antara keduanya. Namun pada penelitian ini, hendak meneliti kembali efek moderasi pemahaman teknologi informasi bagi kualitas pelaporan keuangan maupun tingkat pendidikan pemilik.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belum pernah ada yang meneliti mengenai pemahaman teknologi informasi sebagai variabel moderasi secara menyeluruh, namun sudah ada penelitian yang meneliti pemahaman teknologi informasi sebagai variabel independen dan hasilnya berpengaruh positif. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan dan Tingkat Pendidikan Pemilik terhadap Penerapan SAK EMKM**



**dengan Pemahaman Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM di Jakarta Timur)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Penelitian terdahulu telah mengkaji tentang penerapan SAK EMKM bagi para pelaku UMKM. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penerapan SAK EMKM oleh pelaku UMKM, namun peneliti menemukan *research gap* dari berbagai penelitian. Maka dari itu rumusan masalah yang hendak diteliti adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap penerapan SAK EMKM?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan pemilik terhadap penerapan SAK EMKM?
3. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelaporan keuangan dimoderasi pemahaman teknologi informasi terhadap penerapan SAK EMKM?
4. Apakah terdapat tingkat pendidikan pemilik dimoderasi pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap penerapan SAK EMKM?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap penerapan SAK EMKM.
2. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap penerapan SAK EMKM.

3. Mengetahui pengaruh kualitas pelaporan keuangan dimoderasi pemahaman teknologi informasi terhadap penerapan SAK EMKM
4. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pemilik dimoderasi pemahaman teknologi informasi terhadap penerapan SAK EMKM

#### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa kegunaan dari penelitian ini. Diklasifikasi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Diantaranya adalah:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk memperkaya literatur dalam bidang akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Bidang yang dikhususkan dalam penelitian ini yakni bersinggungan dengan SAK EMKM diharap dapat menjadi evaluasi bagi berbagai pihak mengenai penerapan dan efektifitas dari SAK EMKM.

##### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas laporan UMKM, mengingat banyaknya UMKM yang belum menerapkan SAK EMKM dalam Laporan Keuangan yang disusun. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan pelaku UMKM untuk memberi gambaran untuk membuat penerapan SAK EMKM bagi UMKM menjadi lebih efektif. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk pengabdian kepada masyarakat. Saat ini masyarakat banyak yang membuka usahanya sendiri berbentuk mikro. Sosialisasi penerapan SAK EMKM terhadap

laporan keuangan yang dibuat pelaku UMKM adalah salah satu pengabdian masyarakat yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM dan masyarakat Indonesia.